

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Junaedy, Sumartono
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sisa lebih perhitungan anggaran dan dana otonomi khusus pengaruhnya pada belanja modal. Rumusan masalah penelitian adalah Apakah sisa lebih perhitungan anggaran dan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Papua baik secara parsial maupun simultan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang SiLPA, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Tahun 2008-2012 dan Neraca (SILPA) Tahun 2008-2012.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Dana Otonomi Khusus (OTSUS) terhadap Belanja Modal. Dan Sisa lebih perhitungan anggaran secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Papua.

Kata Kunci : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA/SILPA), Dana Otonomi Khusus (Dana OTSUS), Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri terutama dalam pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan keuangan. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184, Pemerintah Provinsi Papua menyusun Laporan Keuangan sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang

lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua menyusun Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Operasional
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada Provinsi Papua untuk Laporan Keuangan Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 dalam penyusunan Laporan Keuangannya masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dalam penyusunan Laporan Keuangannya menggunakan PP No. 71 Tahun 2010 dimana Laporan Keuangannya masih menggunakan Lampiran 2 pada PP No. 71 Tahun 2010 yaitu SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, penyajian Laporan Keuangan Lampiran 2 pada PP No. 71 Tahun 2010 sama dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja

langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Sementara itu SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Kusnandar dan Siswanto dengan hasil SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama suatu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA (Lampiran IV PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP). Studi yang dilakukan oleh Dicka (2011) menyimpulkan SiLPA berpengaruh negatif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, namun dalam perjalanannya undang-undang tersebut dianggap belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Papua. Akhirnya pada Tahun 2001 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU

21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, diharapkan dengan kebijakan ini akan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua.

Otsus mencakup sejumlah hal terutama: 1) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; 2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan 3) Mewujudkan pemerintahan yang baik berciri: (a). Partisipasi sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b). Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; kemudian (c). Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. 4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk alokasi belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Selanjutnya Saragih (2003) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Belanja modal itu sendiri diartikan sebagai bentuk belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu

satuan kerja dan bukan untuk dijual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud”. Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Suatu belanja dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama Syaiful (2006) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

Sedangkan menurut Halim (2007), “belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan kebutuhan ekonomi.

Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Papua ?
2. Apakah dana otonomi khusus berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi?
3. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran dan dana otonomi khusus berpengaruh secara silmultan terhadap belanja modal ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

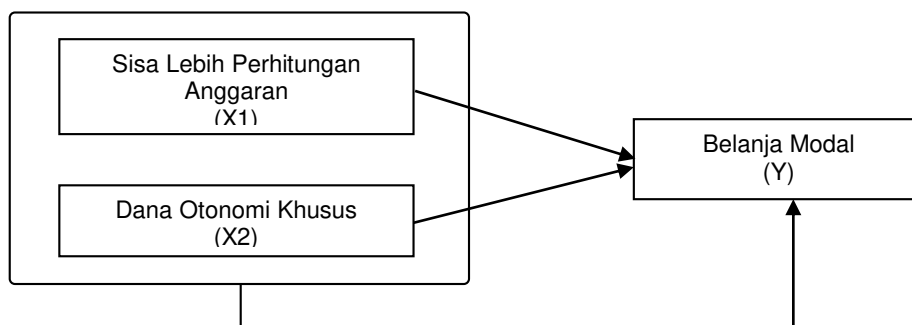
1. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Otonomi Khusus secara parsial terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008-2012).

2. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Otonomi Khusus secara simultan terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008-2012).

LATAR BELAKANG DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pada pasal 34 ayat 3 huruf c.3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset K/L terkait serta bukan untuk dijual.



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Sedangkan menurut Noch dan Rasyid (2012), pengertian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Hipotesis juga merupakan pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008-2012.

H₂ : Terdapat pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008-2012.

H₃: Terdapat pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008-2012.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data *numerik* (angka) menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesa (Notoatmodjo, 2005). Deskriptif Kuantitatif menurut Sukmadinata (2011), adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Whitney (1960) berpendapat, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka.

Menurut Noch dan Rasyid (2012) metode deskriptif adalah suatu studi dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari studi deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan kuantitatif menurut Noch dan Rasyid (2012) menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Audited yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengetahui data tentang SiLPA, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua.

Sampel merupakan bagian jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut (Noch dan Rasyid, 2012). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel bertujuan tersebut (Noch dan Rasyid, 2012). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Tahun 2008-2012 dan Neraca (SILPA) Tahun 2008-2012.

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Noch dan Rasyid, 2012).

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yang menginformasikan tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*). Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2005).

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menghubungkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2002).

Dalam pembahasan ini akan digunakan grafik normal plot, deteksi normalitas yang sering digunakan pada program SPSS adalah dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada suatu grafik. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar lebih jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009). Multikolinearitas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila variabel-variabel bebas saling berkorelasi. Dalam (Ghozali, 2009) multikolinearitas dapat juga dilihat dari :

1. Nilai *tolerance* dan lawannya
2. *Variance Inflation Factor* (VIF)

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan

diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2009).

C. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2009:110). Untuk mendeteksi autokorelasi dapat menggunakan angka Durbin-Watson (D-W) (Ghozali, 2009).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah metode *chart* (diagram *scatterplot*), dengan dasar pemikiran bahwa :

1. Jika ada pola tertentu terdapat titik-titik (point-point), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar keatas dan dibawah nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X_1) dan Dana Otonomi Khusus (X_2) dengan variabel dependen : Belanja Modal (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio (Priyatno, 2008).

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Dimana :

Y' : Belanja Modal
a : Konstanta Regresi
X₁ : Sisa Lebih Pehitungan Anggaran
X₂ : Dana Otonomi Khusus
b₁, b₂: Koefisien Regresi
e : error

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Cara melakukan uji t adalah dengan *Quick Look* yaitu bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H₀ yang menyatakan $b_i=0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai *absolute*). Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2009). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha= 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali,2009). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2009). Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2008-2012. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang dianalisis yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi. Berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 : Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BelanjaModal	5	1049192740138	1421658223557	1276813678394.20	155027779873.86
SiLPA	5	614821151394	1107478333684	847229724908.40	190872219320.51
DanaOTSUS	5	3494864788000	4079797400000	3857133353510.00	221029698043.79
Valid N (listwise)	5				

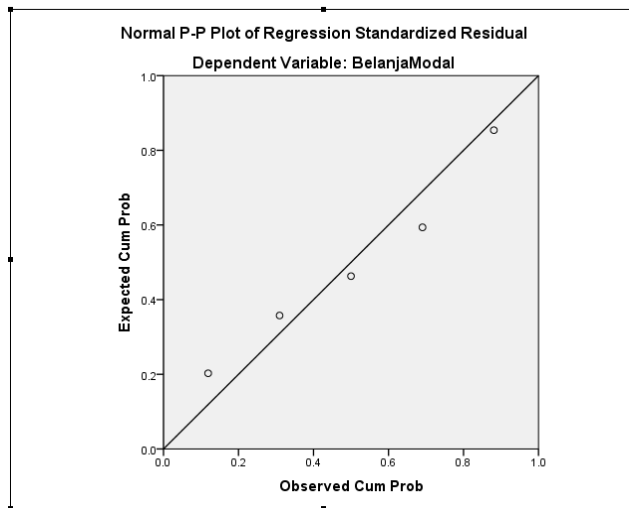
Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan *Software SPSS 21 for Windows*

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel belanja modal dengan jumlah data (N) sebanyak 5 mempunyai belanja modal rata-rata sebesar Rp.1.276.813.678.394,20 dengan belanja modal minimal sebesar Rp.1.049.192.740.138 dan maksimal sebesar Rp.1.421.658.223.557, sedangkan standar deviasinya sebesar Rp.155.027.779.873,86. Variabel SiLPA dengan jumlah data (N) sebanyak 5 mempunyai minimal sebesar Rp.614.821.151.394 dan maksimal sebesar Rp.1.107.478.333.684 mempunyai rata-rata sebesar Rp.847.229.724.908,40 dengan standar deviasi sebesar Rp.190.872.219.320,51. Variabel Dana Otsus rata-rata sebesar Rp.3.857.133.353.510,00 dengan Dana Otsus minimal sebesar Rp.3.494.864.788.000 dan maksimal sebesar Rp.4.079.797.400.000 sedangkan standar deviasinya sebesar Rp.221.029.698.043,79.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang diambil mengikuti sebaran distribusi normal atau tidak.



Gambar 3.1 : Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan *Software SPSS 21 for Windows*

Berdasarkan gambar 4.2 Normal P-P Plot diatas dapat dilihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena merupakan model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti. Pendeteksian dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* (TOL) dan faktor inflasi varians (*Variance Inflation Factor*, VIF).

Tabel 3.2 : Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.325E+12	1.658E+12		1.402	.296		
	SILPA	.237	.479	.291	.494	.671	1.000	1.000
	DanaOTSUS	-.324	.414	-.461	-.782	.516	1.000	1.000

a. Dependent Variable: BelanjaModal

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan *Software SPSS 21 for Windows*

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Dari hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hasil yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi (variabel

independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolonieritas).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel-variabel independen itu sendiri atau berkorelasi sendiri. Pendeteksian gejala autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW). Dengan ketentuan, jika angka dalam Durbin Watson berkisar antara -2 sampai dengan +2 maka koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi sedangkan jika angka DW dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif dan jika DW diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 3.3 : Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.551 ^a	.303	-.393	1.830E+11	1.137

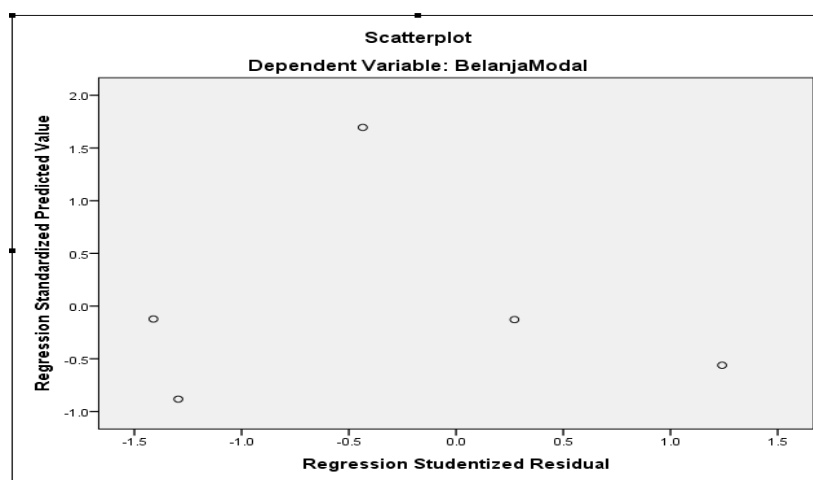
a. Predictors: (Constant), DanaOTSUS, SILPA
b. Dependent Variable: BelanjaModal

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan *Software SPSS 21 for Windows*

Dari tabel 4.3 nilai DW sebesar 1,137 akan dibandingkan dengan nilai tabel DW yang memiliki signifikansi 5% (0,05), jumlah sampel 5 (n) dan jumlah variabel independen 2 ($k = 2$), maka di tabel Durbin Watson (DW) diketahui bahwa nilai DW tersebut berada diantara batas -2 dan dibawah angka +2, nilai DW 1,137 maka dapat disimpulkan nilai tersebut menandakan bahwa koefisien regresi bebas dari gangguan autokorelasi ($-2 < 1,137 < 2$).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah prediktor dalam penelitian mempunyai kekonsistenan dan memiliki standar error yang tidak terlalu besar. Untuk menguji ada tidaknya gejala heterokedastisitas dilakukandengan melihat grafik *scatter plot*. Berikut ini disajikan grafik *scatter plot*.



Gambar 3.2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan *Software SPSS 21 for Windows*

Hasil pengujian dengan analisis grafik Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tersebar baik di atas maupun bawah angka nol pada sumbu Y. Jadi dapat di simpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik karena merupakan model yg homokedastisitas atau varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap (tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi).

3.2 Analisis Regresi Linear Berganda.

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 3.4 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.325E+12	1.658E+12		1.402	.296		
	SILPA	.237	.479	.291	.494	.671	1.000	1.000
	DanaOTSUS	-.324	.414	-.461	-.782	.516	1.000	1.000

a. Dependent Variable: BelanjaModal

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan *Software SPSS 21 for Windows*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal Pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut :

$$Y = 2,325E+12 + 0,237X_1 + (-0,324)X_2 + e$$

Model persamaan regresi berganda di atas bermakna :

- Y = Nilai konstanta sebesar $2,325E+12$ artinya apabila variabel sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS) bernilai nol (0), maka belanja modal nilainya sebesar $2,325E+12$ (Rp. 2.324.643.081.187.17).
- X₁ = Variabel sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien 0,237, artinya setiap pertambahan 1% variabel sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,237 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dengan belanja modal, semakin naik sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) maka semakin meningkat belanja modal.
- X₂ = Variabel dana otonomi khusus (OTSUS) berpengaruh negatif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien -0,324, artinya setiap pertambahan 1% variabel dana otonomi khusus (OTSUS) akan menurun belanja modal sebesar -0,324 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara dana otonomi khusus (OTSUS) dengan belanja modal, semakin naik dana otonomi khusus (OTSUS) maka semakin turun belanja modal.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Penghitungan nilai t_{hitung} dilakukan dengan menggunakan *Software SPSS 21 for Window*. Dari tabel 4.4 diatas yaitu variabel sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS) tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SiLPA sebesar 0,671 dan DanaOTSUS sebesar 0,516 dan keduanya jauh di atas 0,05. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara terpisah dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X₁) terhadap Belanja Modal (Y). Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh t_{hitung} sebesar 0,494, untuk menentukan t_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel statistik pada signifikansi $\alpha = 0,05$, $df = n-k-1$ maka diperoleh $df = 5-2-1 = 2$ sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 4,303. Perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu $0,494 < 4,303$, maka H₀ diterima dan H_{a1} ditolak. Dengan melakukan pengujian pada derajat signifikansi atau pada tingkat probabilitas, dari hasil uji t diperoleh signifikansi sebesar $0,671 > 0,05$, maka H₀ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X₁) tidak signifikan terhadap belanja modal (Y). Karena nilai koefisien b₁ tanda positif, maka SiLPA menunjukkan hubungan yang searah dengan Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Dana Otonomi Khusus (OTSUS) (X_2) terhadap Belanja Modal (Y). Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh t_{hitung} sebesar -0,782, sedangkan t_{tabel} sebesar 4,303. Perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu $-0,782 < 4,303$, maka H_0 diterima dan H_{a2} ditolak. Dengan melakukan pengujian pada derajat signifikansi atau pada tingkat probabilitas, dari hasil uji t diperoleh signifikansi sebesar $0,516 > 0,05$, maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Otonomi Khusus (OTSUS) (X_2) tidak signifikan terhadap belanja modal (Y). Karena nilai koefisien b_2 tanda negatif, maka menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dengan Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DanaOTSUS tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel bebas X_1 , dan X_2 terhadap variabel terikat Y. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel}

Tabel 3.5 : Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.916E+22	2	1.458E+22	.435	.697 ^b
	Residual	6.697E+22	2	3.349E+22		
	Total	9.613E+22	4			

a. Dependent Variable: BelanjaModal

b. Predictors: (Constant), DanaOTSUS, SiLPA

Dari uji F di dapat F_{hitung} sebesar 0,435 dengan tingkat probabilitas 0,697 karena probalitas jauh lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Atau untuk menentukan F_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel statistik pada signifikansi $\alpha = 0,05$, $df_1 = k-1$, $df_2 = n-k$ maka diperoleh $df_1 = 2 - 1 = 1$ dan $df_2 = 5 - 2 = 3$ sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 10,13. Perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu $0,435 < 10,13$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dengan melakukan pengujian pada derajat signifikansi atau pada tingkat probabilitas, dari hasil uji F diperoleh signifikansi sebesar $0,697 > 0,05$ atau probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SiLPA (X_1) dan DanaOTSUS (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal (Y).

Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur garis regresi atau secara verbal mengukur proporsi total varians dalam Y yang dijelaskan oleh regresi. Sebelum mengukur koefisien determinasi terlebih dahulu harus menghitung koefisien korelasi (R). Penghitungan koefisien korelasi pada penelitian ini menggunakan *Software SPSS 21 for Windows* Hasil penghitungan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 : Hasil Analisis Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.551 ^a	.303	-.393	1.830E+11	1.137

a. Predictors: (Constant), DanaOTSUS, SiLPA
b. Dependent Variable: BelanjaModal

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan *Software SPSS 21 for Windows*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diperoleh R^2 (R Square) sebesar 0,303 atau (30,3%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS)) terhadap variabel dependen (belanja modal) sebesar 30,3%. Atau variasi variabel indepden yang digunakan dalam model (sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS)) mampu menjelaskan sebesar 30,3% variasi variabel dependen (belanja modal). Sedangkan sisanya 69,7% ($100\% - 30,3\% = 69,7\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (sebab-sebab yang lain di luar model).

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat dijelaskan secara parsial pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran dan dana otonomi khusus terhadap belanja modal adalah sebagai berikut :

H₁ Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh yang dihasilkan yaitu positif. Artinya bila SiLPA meningkat 1% maka Belanja Modal juga naik sebesar 0,237 (23,7%) dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dengan belanja modal, semakin naik sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) maka semakin meningkat belanja modal.

Dari tabel 4.5 diatas yaitu variabel sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SiLPA sebesar 0,671 jauh di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

H₂ Pengaruh Dana Otonomi Khusus (OTSUS) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dengan Belanja Modal. Diperoleh pengaruh yang negatif antara Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dengan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Papua. Artinya bila Dana Otonomi Khusus (OTSUS) meningkat 1%, maka Belanja Modal akan menurun sebesar -0,324 (-32,4%) dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara dana otonomi khusus (OTSUS) dengan belanja modal, semakin naik dana otonomi khusus (OTSUS) maka semakin turun belanja modal.

Dari tabel 4.5 diatas yaitu variabel dana otonomi khusus (OTSUS) tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk DanaOTSUS sebesar 0,516 jauh di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DanaOTSUS tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

H₃ Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.5 di atas F_{hitung} sebesar 0,435 dengan tingkat probabilitas 0,697 karena probabilitas jauh lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diperoleh R^2 (R Square) sebesar 0,303 atau (30,3%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS)) terhadap variabel dependen (belanja modal) sebesar 30,3%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana otonomi khusus (OTSUS)) mampu menjelaskan sebesar 30,3% variasi variabel dependen (belanja modal). Sedangkan sisanya 69,7% ($100\% - 30,3\% = 69,7\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SiLPA (X_1) dan DanaOTSUS (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal (Y).

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Kemudian Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Dana Otonomi Khusus (OTSUS) terhadap Belanja Modal. Dan Sisa lebih perhitungan anggaran secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam penelitian ini menggunakan sampel yang kecil sehingga diharapkan penelitian lanjutan dapat menambahkan sampel dengan menambah periode pengamatan dan menambah variabel Independen yang diprediksi mempengaruhi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijayana, Priya (2011), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Akbar, Taufik. (2012), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011).
- Fachony, Adi Dicka. (2011), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah).
- Ghozali, Imam. (2002). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi : 4. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Semarang Badan Penerbit UNDIP
- Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusnandar dan Siswanto, Universitas Indonesia, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Laporan Keuangan Audited Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2008 sampai dengan 2012
- Noch, Muhamad, Yamin, and Abdul Rasyid. (2012). Metodologi Penelitian (Untuk Manajemen dan Akuntansi). Medan: Perdana Publishing.
- Notoatmodjo, S. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho Fajar (2012), Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah).
- Priyatno, Dwi. (2008). Mandiri Belajar SPSS. Yogyakarta: Mediakom.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- _____.(2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____.(2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana, Syaodih. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.

Syaiful, Syaiful. (2015). Pengertian dan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam kaidah akuntansi Pemerintah 2006. Diakses 9 September 2015. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007, tentang Bagan Akun Standar.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008, tentang Pengertian Belanja Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Perubahan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah.